

EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR BERDASARKAN HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Adriana Lopo¹, Yosef De Ancieta R. Ola Korebima²

^{1,2} Program Studi Keuangan dan Perbankan, AKUB Effata Kupang
 Jl. Sumba No.17 Fatubesi, Kupang – Nusa Tenggara Timur, Indonesia
 Email: ¹Adrianalopo20@gmail.com, ²yoriscorebima23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis rasio keuangan daerah, yang meliputi rasio efektivitas, rasio efisiensi belanja, rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, serta kecenderungan opini BPK. Data penelitian diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur periode 2021–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD berfluktuasi, dengan capaian sangat rendah karena pada tahun 2021 sebesar 74,38% dan pada tahun 2022 sebesar 49,9% termasuk tidak efektif namun meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 97,40% sehingga masuk kategori cukup efektif. Efisiensi belanja daerah relatif stabil meskipun masih berada pada kategori kurang efisien. Rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi sangat rendah, yang mengindikasikan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Sementara itu, opini BPK atas laporan keuangan Kabupaten Flores Timur masih berada pada kategori Wajar Dengan Pengecualian.

Kata kunci: Kinerja keuangan, Pemerintah daerah, Kabupaten Flores Timur, Audit keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRACT

This study aims to evaluate the financial performance of the East Flores Regency Government based on audit results from the Supreme Audit Agency (BPK) of the Republic of Indonesia, East Nusa Tenggara Province Representative Office. The research method used a quantitative approach with regional financial ratio analysis, including effectiveness ratios, expenditure efficiency ratios, regional financial independence ratios, degree of decentralization, and BPK opinion trends. Research data were obtained from the BPK Audit Report (LHP) and the East Flores Regency Government's financial statements for the 2021–2023 period. The results show that regional revenue (PAD) effectiveness fluctuates, with very low achievement, reaching 74.38% in 2021 and 49.9% in 2022, categorized as ineffective, but increasing again in 2023 to 97.40%, categorized as moderately effective. Regional spending efficiency is relatively stable, although still in the less efficient category. The regional financial independence ratio and degree of decentralization are very low, indicating a high dependence on central transfer funds. Meanwhile, the Supreme Audit Agency (BPK)'s opinion on the East Flores Regency financial report remains Fair with Exceptions.

Keywords: Financial performance, Regional government, East Flores Regency, Financial audit, Supreme Audit Agency

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggara pemerintah daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam rangka memastikan akuntabilitas tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki mandat konstitusional untuk melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil audit BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini, temuan, serta rekomendasi perbaikan. Opini BPK menjadi indikator penting untuk menilai kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Opini

tersebut dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), maupun pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer).

Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPK untuk di audit. Hasil audit tersebut mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, lemahnya sistem pengendalian internal, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan. Hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan serta kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah, menemukan faktor-faktor penghambat, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2022). Evaluasi kinerja keuangan penting untuk menilai apakah anggaran digunakan sesuai prioritas pembangunan, serta untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Beberapa indikator yang umum digunakan dalam evaluasi kinerja keuangan meliputi : Rasio likuiditas, Rasio solvabilitas, Rasio efisiensi dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Priyono & Haryanto, 2019).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertugas melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (BPK RI, 2020). Hasil audit BPK digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, serta menjadi acuan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja pemerintah.

Kabupaten Flores Timur, sebagai salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur, mengalami perkembangan pengelolaan keuangan namun masih menghadapi beberapa tantangan, seperti 1).Kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur akuntansi daerah 2).Pencatatan aset dan pengelolaan pendapatan daerah, 3). Efisiensi penggunaan anggaran publik (BPK RI Perwakilan NTT, tahun). Hasil audit BPK RI memberikan data empiris mengenai kinerja keuangan Kabupaten Flores Timur, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan berdasarkan temuan nyata dan menjadi dasar rekomendasi kebijakan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deksriptif kuantitatif, menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang ini berdasarkan fakta.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2022-2023. Pemerintah Kabupaten Pati memiliki kinerja fiskal yang menunjukkan capaian positif dengan tren penyaluran yang semakin kuat menjelang akhir tahun anggaran.

Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Operasional.

Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan melakukan perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam melakukan perhitungan rasio keuangan menggunakan data atau informasi yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur

Perhitungan Rasio Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa tergantung pada sumber dana eksternal. Rumus untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

Rasio kemandirian = (Realisasi PAD) / (Total Pendapatan daerah)

Rasio kemandirian keuangan yang rendah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Rasio Efektifitas keuangan daerah

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. Rumus untuk menghitung rasio efektifitas keuangan daerah sebagai berikut:

Rasio efektifitas = (Realisasi PAD) / (Anggaran PAD)

Rasio efektifitas yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber PAD dengan baik dan memanfaatkannya secara optimal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebaliknya, rasio efektifitas yang rendah menunjukkan pemerintah daerah belum mampu secara maksimal menggalipotensi PAD yang dimiliki.

Rasio Efisiensi keuangan daerah

Rasio ini menunjukkan hubungan antara biaya yang dikeluarkan untuk membiayai belanja daerah dengan cara menghasilkan pendapatan dengan realisasi pendapatan. Rumus untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah sebagai berikut:

Rasio efisiensi = (Realisasi belanja) / (Realisasi pendapatan)

Rasio efisiensi keuangan dengan angka semakin kecil, maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rasio Kesenjangan keuangan daerah

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal). Pemerintah daerah yang ideal akan mengalokasikan anggaran yang berimbang antara belanja operasi dan belanja modal agar dapat menjalankan roda pemerintahan sekaligus melakukan pembangunan di daerahnya. Rumus untuk menghitung rasio kesenjangan keuangan daerah sebagai berikut:

Rasio belanja operasi = (belanja operasi) / (total belanja daerah)

Rasio belanja modal = (belanja modal) / (total belanja daerah)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kinerja Keuangan

Evaluasi kinerja keuangan adalah proses penilaian terhadap kemampuan pemerintah daerah (atau organisasi) dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga akuntabilitas serta transparansi. Menggunakan beberapa rasio yaitu rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, dan Kecenderungan Opini BPK. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan melalui hasil analisis opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Flores Timur berdasarkan ketentuan kewajaran penyajian laporan keuangan apakah sudah sesuai SAP atau belum. Berikut adalah rekapitulasi perhitungan rasio evaluasi kinerja keuangan:

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penilaian Terhadap tingkat efektivitas PAD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021-2023 berdasarkan kriteria Penilaian Dari sumber BPK RI Perwakilan NTT dapat di Lihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Hasil	Kriteria
2021	58.881.018.693,82	79.164.582.902,00	74,38%	Tidak Efektif
2022	55.180.838.703,38	1.105.565.803.666,00	4,99%	Tidak Efektif
2023	50.340.879.438,12	51.683.483.652,00	97,40%	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 1. diatas maka dapat dilihat Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur mengalami Penurunan. Pada Tahun 2021-2023 diketahui bahwa anggaran atau target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur mengalami penurunan. Pada Tahun 2021 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur Sebesar Rp.58.881.018.693,82 pada Tahun 2022 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur mengalami penurunan sebesar Rp.55.180.838.703,38 dan pada Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.50.340.879.438,12.

Anggaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2021-2023 diketahui bahwa anggaran atau target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kupang mengalami Fluktuasi atau peningkatan dan Penurunan. Pada Tahun 2021 anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.79.164.582.902,00 pada Tahun 2022 PAD Kabupaten Flores Timur mengalami kenaikan sebesar Rp.1.105.565.803.666,00 dan pada Tahun 2023 PAD Kabupaten Flores Timur mengalami penurunan sebesar Rp.51.683.483.652,00.

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efisien suatu dalam menggunakan anggaran atau belanja yang dimilikinya untuk mencapai hasil atau output tertentu.

Tabel 2 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Flores Timur Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Hasil	Kriteria
2021	1.074.000.093.374,22	1.164.307.516.585,22	92,24%	Kurang Efisien
2022	1.072.247.164.053,85	1.141.759.665.659,00	93,91%	Kurang Efisien
2023	1.111.787.707.050,45	1.214.709.310.732,00	91,53%	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah Penulis 2025

Berdasarkan Tabel 2 mengenai Rekapitulasi mengenai rasio efisiensi belanja Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2021-2023, dapat diketahui bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola belanja berada pada kategori kurang efisien. Hal ini terlihat dari Realisasi Belanja Tahun 2021 realisasi belanja mencapai Rp1.074.000.093.374,22 dari total anggaran Rp1.164.307.516.585,22. Pada tahun 2022, realisasi belanja sebesar Rp1.072.247.164.053,85 dari anggaran Rp1.141.759.665.659,00. Sementara itu, pada tahun 2023, realisasi belanja

sebesar Rp1.111.787.707.050,45 dari anggaran Rp1.214.709.310.732,00. Efisiensi belanja daerah masih berada pada kategori kurang efisien karena pada Tahun 2021 – 2023 nilai rasio yang di peroleh pada skala 90%-100% dengan rincian Tahun 2021 sebesar 92,24%, Tahun sebesar 2022 93,91% dan Tahun 2023 sebesar 91,53%. Selama tiga tahun berturut-turut, tingkat efisiensi belanja Kabupaten Flores Timur selalu berada di atas 90% dan masuk kategori Kurang Efisien. Artinya, pemerintah daerah belum mampu melakukan penghematan anggaran secara optimal dan masih perlu memperkuat pengawasan serta perencanaan belanja agar lebih efisien.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bergantung terlalu besar pada bantuan dari pemerintah pusat atau Provinsi.

Tabel 3. Rekapitulasi perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	RKKD	Kriteria
2021	58.881.018.693,82	1.004.356.952.669,00	5,86%	Sangat Kurang
2022	55.180.838.703,38	1.001.474.745.620,00	5,51%	Sangat Kurang
2023	50.340.879.438,12	1.068.697.907.803,00	4,71%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah Penulis 2025

Berdasarkan Tabel 3 diatas maka dapat dilihat laporan realisasi anggaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021-2023 realisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer mengalami Fluktuasi atau terjadinya kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.58.881.018.693,82 pada Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan menjadi Rp.55.180.838.703,38 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menurun pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.50.340.879.438,12.

Pendapatan transfer berdasarkan laporan keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2021 pendapatan transfer sebesar Rp. 1.004.356.952.669,00 pada Tahun 2022 pendapatan transfer menurun menjadi Rp.1.001.474.745.620,00 dan pada Tahun 2023 pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp.1.068.697.907.803,00. Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021- 2023 pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa rasio kemandirian tergolong sangat kurang yaitu pada Tahun 2021 rasio kemandirian daerah sebesar 56,86% pada Tahun 2022 sebesar 5,51% dan pada Tahun 2023 sebesar 4,71% dari hasil perhitungan rasio kemandirian daerah yang sangat kurang pada Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2021-2023 bisa disebabkan oleh sejumlah factor yang berakitan dengan ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat baik berupa Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, maupun Dana Alokasi Khusus, Serta kurangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah secara mandiri.

Berikut beberapa factor yang menjelaskan mengapa rasio kemandirian Daerah Kabupaten Flores Timur sangat kurang dalam tiga tahun terakhir karena ketergantungan tinggi terhadap dana dari pusat Pemerintah Pusat seperti (DAU dan DAK), kurangnya pengelolaan dan optimalisasi PAD, terbatasnya diversifikasi sumber pendapatan, serta rendahnya sistem kapasitas daerah untuk menggali potensi ekonomi secara maksimal. Selain itu faktor seperti pengelolaan asset yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, dan dampak dari ketidakstabilan ekonomi juga turut mempengaruhi ekonomi tersebut. Untuk memperbaiki rasio kemandirian daerah, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan yang lebih fokus pada pengembangan potensi ekonomi lokal.

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah.

Tabel 4 Rekapitulasi Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Tahun 2021-2023

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Hasil	Presentase
2021	58.881.018.693,82	1.063.984.334.094,00	1,60%	Sangat Rendah
2022	55.180.838.703,38	1.091.832.207.789,38	1,09%	Sangat Rendah
2023	50.340.879.438,12	1.149.177.335.557,12	1,15%	Sangat Rendah

Sumber: Data diolah Penulis 2025

Berdasarkan Tabel 4 mengenai Rekapitulasi Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2021– 2023, terlihat adanya fluktuasi pada nilai rasio desentralisasi. Pada tahun 2021, rasio tercatat sebesar 1,60%, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 1,09%, dan kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023 dengan nilai 1,15%. Walaupun terdapat dinamika kenaikan dan penurunan, ketiga angka tersebut tetap berada dalam kategori “Sangat Rendah”, yang menandakan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Flores Timur masih jauh dari ideal. Penurunan rasio dari tahun 2021 ke 2022 disebabkan oleh berkurangnya penerimaan PAD dari Rp.58.881.018.693,82 menjadi Rp.55.180.838.703,38. Penurunan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi

sumber-sumber PAD belum berjalan maksimal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi ini antara lain menurunnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah akibat keterbatasan aktivitas ekonomi masyarakat, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta kurangnya inovasi dalam menggali potensi pendapatan baru.

Pada saat yang sama, total pendapatan daerah justru meningkat dari Rp1.063.984.334.094,00 menjadi Rp.1.091.832.207.789,38, terutama karena adanya tambahan dana transfer dari pemerintah pusat. Konsekuensinya, meskipun total pendapatan naik, kontribusi PAD semakin kecil terhadap keseluruhan pendapatan daerah, sehingga rasio derajat desentralisasi menurun.

Sementara itu, peningkatan rasio yang terjadi pada tahun 2023 dari 1,09% menjadi 1,15% bukanlah hasil dari kenaikan PAD, melainkan lebih dipengaruhi oleh dinamika total pendapatan. Secara nominal, PAD justru kembali menurun menjadi Rp.50.340.879.438,12 namun total pendapatan daerah meningkat cukup besar menjadi Rp.1.149.177.335.557,12. Dengan demikian, meskipun PAD menurun, proporsinya terhadap total pendapatan mengalami sedikit perbaikan. Peningkatan ini bersifat relatif dan tidak mencerminkan peningkatan kemandirian fiskal yang signifikan, karena pada kenyataannya, kapasitas PAD tetap melemah dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa Kabupaten Flores Timur masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Ketergantungan pada dana transfer pusat tetap sangat tinggi, sementara kontribusi PAD masih minim. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk mengoptimalkan PAD, baik melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendukung kepatuhan wajib pajak, maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan potensi daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan derajat desentralisasi sehingga kemandirian keuangan daerah dapat lebih baik di masa mendatang.

Kecenderungan Opini Audit dan Analisis Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bentuk pernyataan profesional atas tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Opini tersebut didasarkan pada kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, opini BPK menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Flores Timur.

Pada periode 2021–2023, kondisi kinerja keuangan Kabupaten Flores Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas realisasi anggaran mengalami ketidakstabilan, bahkan pada tahun 2022 hanya tercapai 4,99% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam perencanaan anggaran maupun dalam optimalisasi potensi sumber-sumber PAD. Kondisi seperti ini biasanya menjadi sorotan BPK dalam audit, karena mengindikasikan perencanaan yang tidak realistis dan kelemahan tata kelola fiskal. Dari aspek efisiensi belanja, Kabupaten Flores Timur selama tiga tahun terakhir hanya mampu mencapai kategori “kurang efisien” dengan rasio antara 91–94%. Meskipun realisasi belanja cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan total anggaran, nilai efisiensinya masih belum optimal. BPK biasanya menilai hal ini sebagai adanya indikasi pemborosan atau rendahnya efektivitas dalam pemanfaatan anggaran. Kelemahan dalam manajemen belanja dapat berimplikasi pada opini BPK, karena efisiensi menjadi salah satu ukuran penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Analisis terhadap rasio kemandirian daerah juga memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Pada tahun 2021–2023, tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Flores Timur hanya berada pada kisaran 4–6%. Artinya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sangat kecil, sedangkan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama mengapa opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah seringkali disertai catatan, karena rendahnya kemandirian keuangan menunjukkan lemahnya basis fiskal daerah. Selain itu, derajat desentralisasi Kabupaten Flores Timur selama tiga tahun terakhir masih berada pada kategori “sangat rendah”, yakni hanya sekitar 1%. Angka ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sangat minimal, sehingga kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan layanan publik secara mandiri masih jauh dari ideal. Bagi BPK, kondisi ini merupakan salah satu temuan yang memperlihatkan masih lemahnya peran pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Dari segi kecenderungan opini audit, dengan memperhatikan kondisi efektivitas PAD yang rendah, efisiensi belanja yang kurang baik, serta kemandirian dan desentralisasi fiskal yang sangat rendah, maka opini BPK atas laporan keuangan Kabupaten Flores Timur cenderung masih berada pada kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini biasanya diberikan ketika laporan keuangan secara umum dianggap wajar, tetapi masih terdapat beberapa hal material yang dikecualikan, misalnya dalam aspek pengelolaan aset, kepatuhan terhadap regulasi, atau penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan SAP.

Salah satu temuan umum yang sering diangkat BPK pada pemerintah daerah dengan karakteristik seperti Kabupaten Flores Timur adalah kelemahan dalam manajemen aset tetap. Aset sering kali belum tercatat secara memadai, tidak terdokumentasi dengan baik, atau belum dilakukan penilaian yang sesuai. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang andal. Kelemahan pengelolaan aset juga berdampak pada kurangnya transparansi serta membuka peluang bagi inefisiensi dan penyalahgunaan.

Temuan lain yang lazim adalah perencanaan anggaran yang tidak realistis. Pada tahun 2022, target PAD Kabupaten Flores Timur ditetapkan sangat tinggi, mencapai Rp.1,1 triliun, namun realisasi yang diperoleh hanya sekitar Rp.55 miliar. Perbedaan yang sangat besar ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan proyeksi keuangan, sehingga menjadi catatan serius dari BPK terkait kurangnya kehati-hatian dalam penyusunan APBD.

Kelemahan perencanaan seperti ini berdampak pada kredibilitas pengelolaan anggaran daerah. Selain kelemahan perencanaan, BPK biasanya juga menyoroti aspek kepatuhan terhadap regulasi. Rendahnya kemandirian fiskal dan desentralisasi menunjukkan bahwa daerah belum mampu sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pusat, di satu sisi, membantu keberlangsungan pembangunan, tetapi di sisi lain menunjukkan minimnya upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah, yang seharusnya menjadi bagian dari kepatuhan terhadap prinsip otonomi fiskal.

Berdasarkan kecenderungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Flores Timur masih mencerminkan adanya sejumlah permasalahan struktural yang harus segera dibenahi. Temuan-temuan BPK bukan hanya sebatas catatan teknis, melainkan juga menjadi indikator adanya kelemahan tata kelola yang lebih mendasar. Jika tidak segera diatasi, kelemahan tersebut akan terus berulang setiap tahun dan menghambat peningkatan opini ke arah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Implikasi dari opini BPK dan temuan audit bagi pemerintah daerah sangat besar. Opini yang belum WTP dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah, sekaligus mempengaruhi persepsi pemerintah pusat dalam memberikan alokasi dana transfer. Selain itu, opini yang belum optimal juga dapat berdampak pada rendahnya minat investor untuk menanamkan modal di daerah, karena dianggap masih kurang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Untuk memperbaiki kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu melakukan langkah strategis dalam memperkuat manajemen keuangan daerah. Pertama, memperbaiki perencanaan anggaran agar lebih realistis dan sesuai dengan potensi riil yang dimiliki. Kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah melalui sistem inventarisasi yang akurat dan terintegrasi. Ketiga, memperkuat sistem pengendalian internal untuk meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dan memastikan setiap transaksi keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Upaya peningkatan PAD juga harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi intensifikasi, yaitu mengoptimalkan pajak dan retribusi yang sudah ada dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta ekstensifikasi, yaitu mencari sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan potensi daerah, misalnya sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian. Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat diperkuat, dan derajat desentralisasi bisa meningkat secara bertahap.

Hasil Penilaian

Rasio Efektivitas terhadap PAD

Rasio Efektivitas terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi penerimaannya. Berikut ini Rasio Keuangan Kabupaten Flores Timur (2021-2023):

Tabel 5 Rasio Efektifitas PAD

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria	Penilaian
2021	74,38%	<75%	Tidak Efektif
2022	49,9%	<75%	Tidak Efektif
2023	97,40%	90-99%	Cukup Efektif

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Efektivitas PAD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 dan 2022 berada di bawah 75% sehingga masuk kategori tidak efektif dan dinilai tidak sehat. Tahun 2023 terjadi perbaikan dengan capaian 97,40% sehingga masuk kategori cukup efektif, namun masih dikategorikan kurang sehat karena belum mencapai tingkat efektif penuh (100% atau lebih).

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 6 Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Rasio Efisiensi	Kriteria	Penilaian
2021	92,24%	90-100%	Kurang Efisien
2022	93,91%	90-100%	Kurang Efisien
2023	91,53%	90-100%	Kurang Efisien

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Efisiensi belanja selama 2021–2023 berada di kisaran 90–100%, yang termasuk kategori kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja daerah belum dikelola secara hemat dan optimal, sehingga dikategorikan tidak sehat pada seluruh periode.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah, yaitu sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mendukung kebutuhan keuangan daerah dibandingkan dengan dana transfer dari pusat.

Tabel 7 Rasio Kemandirian

Tahun	RKKD	Kriteria	Penilaian
2021	5,86%	0-10%	Sangat Kurang
2022	5,51%	0-10%	Sangat Kurang
2023	4,71%	0-10%	Sangat Kurang

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah, dengan capaian <10% pada seluruh periode. Hal ini menandakan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pusat, sehingga kinerja kemandirian keuangan daerah dikategorikan tidak sehat.

Derajat Desentralisasi

Rasio ini menggambarkan tingkat pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi derajat desentralisasi suatu daerah.

Tabel 8 Derajat Desentralisasi

Tahun	DD	Kriteria	Penilaian
2021	1,60%	0-10%	Sangat Rendah
2022	1,09%	0-10%	Sangat Rendah
2023	1,15%	0-10%	Sangat Rendah

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Derajat desentralisasi yang sangat rendah (<10%) menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hampir tidak signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa keuangan daerah Kabupaten Flores Timur tidak sehat karena belum mampu mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

Kecenderungan Opini BPK

Kecenderungan opini adalah arah atau pola opini audit yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan suatu entitas (misalnya pemerintah daerah) dari tahun ke tahun.

Tabel 9 Kecenderungan Opini BPK

Tahun	Opini BPK	Kriteria	Penilaian
2021	WDP	Wajar Dengan Pengecualian	Kurang Sehat
2022	WDP	Wajar Dengan Pengecualian	Kurang Sehat
2023	WDP	Wajar Dengan Pengecualian	Kurang Sehat

Sumber : Diolah Oleh Penulis

Opini BPK yang diberikan adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini berarti laporan keuangan daerah dianggap wajar, tetapi masih terdapat permasalahan signifikan seperti pengelolaan aset yang belum tertib, kepatuhan terhadap regulasi yang rendah, atau kelemahan pengendalian internal. Oleh karena itu, opini WDP dikategorikan sebagai kurang sehat, karena meskipun tidak sepenuhnya salah, kualitas laporan keuangan belum optimal.

4. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Hasil Audit BPK, dapat disimpulkan bahwa Kinerja keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan meskipun terdapat tren perbaikan pada beberapa aspek. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kondisi yang fluktuatif, di mana pada tahun 2021 sebesar 74,38% dan tahun 2022 sebesar 49,9% termasuk tidak efektif, sedangkan pada tahun 2023 meningkat sebesar 97,40% sehingga masuk kategori cukup efektif.

Efisiensi belanja, kinerja keuangan masih kurang efisien karena sebagian besar anggaran terserap pada belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan, sehingga belum memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemandirian keuangan daerah juga masih sangat rendah (kurang dari 10%) yang menunjukkan ketergantungan yang besar pada dana transfer dari pemerintah pusat. Begitu pula dengan derajat desentralisasi yang rendah (kurang dari 2%) sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih sangat kecil.

Hasil audit BPK menegaskan bahwa meskipun opini atas laporan keuangan Kabupaten Flores Timur menunjukkan tren yang membaik, namun kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI) dan tindak lanjut rekomendasi masih perlu mendapatkan perhatian serius. Secara keseluruhan, evaluasi kinerja keuangan berdasarkan hasil audit BPK menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Flores Timur masih perlu ditingkatkan baik dari aspek efektivitas, efisiensi, kemandirian, maupun tindak lanjut rekomendasi audit.

Saran yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur lebih fokus pada peningkatan PAD dengan menetapkan target yang realistis sesuai dengan potensi ekonomi lokal serta memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset.

Pemerintah juga perlu meningkatkan efisiensi belanja melalui perencanaan anggaran yang lebih selektif dengan mengurangi porsi belanja rutin dan memperbesar alokasi untuk belanja pembangunan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tindak lanjut atas setiap rekomendasi

BPK harus dilaksanakan dengan konsisten dan tepat waktu agar kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan.

Bagi BPK, diharapkan hasil audit tidak hanya sebatas evaluasi tetapi juga memberikan rekomendasi yang lebih solutif serta memperkuat fungsi monitoring agar rekomendasi benar-benar dilaksanakan. BPK juga dapat melakukan pembinaan teknis kepada aparaturnya agar penerapan standar akuntansi pemerintahan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Andriani, I. Suarsa, and N. Yuniarti, *Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [2] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. Jakarta: BPK RI, 2020.
- [3] Febrianty, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2022.
- [4] I. Fahmi and Lumantow, *Analisis Kinerja Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- [5] Hery, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo, 2021.
- [6] Hutabarat, *Manajemen Kinerja Keuangan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020.
- [7] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- [8] Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: KSAP, 2022.
- [9] Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- [10] S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2020.
- [11] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, 2010.
- [12] Siswanto and Maylani, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2022.
- [13] Tahirs, *Pengantar Kinerja Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- [14] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, 2014.
- [15] V. W. Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.